



**Laporan Kinerja Triwulan 1
BPMP Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada BPMP Provinsi Kepulauan Riau selama triwulan 1 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 1	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen				
[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	64,06	Persen	0	0
[IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	57,61	Persen	0	0
[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Kepulauan Riau				
[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Kepulauan Riau dengan kategori sangat baik	Sangat Baik	Kategori	-	-
[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Kepulauan Riau minimal A	A	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen

[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran

Progress/Kegiatan

Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen didukung oleh KRO Fasilitas dan Pembinaan Lembaga (DI.7605.QDB) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 79.433.512 (0,94%) dari pagu anggaran Rp 8.406.687.000 (termasuk pagu blokir Rp 7.885.981.000). Capaian Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran dengan target 64,06% masih belum dapat dihitung realisasinya, dikarenakan belum ada data yang akan dijadikan dasar perhitungan. Akan tetapi sudah dilakukan beberapa kegiatan pendukung dari RO Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya (DI.7605.QDB.750) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 79.433.512 (0,94%) dari pagu anggaran Rp 8.406.687.000 (termasuk pagu blokir Rp 7.885.981.000).



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dengan rincian kegiatan dari komponen:

1. Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan (DI.7605.QDB.750.096) melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Subkomponen (HP) Melakukan tindak lanjut power map dengan 100% pelaksanaan 2 kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 1. Agenda Pertemuan dengan Walikota Batam, sekaligus mengikuti rangkaian kegiatan Kepemimpinan OSIS Berbagi SMP Negeri 12 Batam, di SMP Negeri 12 Batam pada tanggal 19 s.d. 20 Maret 2025 dengan sasaran kegiatan Walikota Batam, Dinas Pendidikan Kota Batam, dan SMPN 12 Batam. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan, serta memetakan kekuatan atau arah baru kebijakan pendidikan. Dampak dari kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan partisipasi strategis dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua di Kota Batam, dengan kepemimpinan baru Walikota Batam.
 2. Bootcamp Refleksi Pelaksanaan Tugas Konsultan BPMP Provinsi Kepulauan Riau, di Kab. Bintan pada tanggal 4 s.d. 5 Januari 2025 dengan sasaran kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan. Output dari kegiatan ini adalah pelaksanaan bootcamp refleksi dan evaluasi tugas konsultan BPMP Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Bintan. Dampak dari kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan kualitas dan koordinasi pelaksanaan tugas konsultan di daerah.
2. Subkomponen (ZC) Pembelajaran Mendalam dengan 100% pelaksanaan 2 kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan Pembukaan Konferensi Provinsi V PGRI Kepulauan Riau, di Gedung Raja Ahmad Engku Haji Tua Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang pada tanggal 9 Februari 2025 dengan sasaran kegiatan Seluruh PGRI Kab/kota Provinsi Kepulauan Riau. Output dari kegiatan ini adalah Musda PGR, dan Penyusunan Pengurus PGRI Provinsi Kepulauan Riau. Dampak dari kegiatan ini diharapkan terbangunnya silaturahmi Seluruh PGRI bersama Pemangku Kepentingan dan BPMP Kepulauan Riau serta terbentuknya Pengurusan Periode Berikutnya.
3. Subkomponen (ZD) Coding AI dengan 100% pelaksanaan 2 kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan Diskusi Terpumpun terkait Kebijakan Digitalisasi Pendidikan dan Kecerdasan Artifisial bersama SKM, di Kota Batam pada tanggal 20 s.d. 21 Februari 2024 dengan sasaran kegiatan Staf Khusus Menteri. Output dari kegiatan ini adalah Kebijakan Digitasifikasi Pendidikan dan Kecerdasan Artifisial. Dampak dari kegiatan ini diharapkan meningkatnya mutu pendidikan melalui kebijakan kecerdasan artifisial.
4. Subkomponen (ZG) Penanaman 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dengan 100% pelaksanaan 3 kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 1. Koordinasi Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Siswa Jenjang Dasar dan Menengah di Dinas Pendidikan Kota Batam pada tanggal 25 s.d. 26 Februari 2025 dengan sasaran kegiatan Kepala Sekolah lingkup Dinas Pendidikan kota Batam. Output dari kegiatan ini adalah pemahaman pentingnya Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dalam proses belajar mengajar di kelas. Dampak dari kegiatan ini diharapkan adanya implementasi nilai-nilai utama Gerakan Nasional Revolusi Mental.
 2. Koordinasi Pendampingan Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Dinas Pendidikan Kota Batam pada tanggal 28 Februari s.d. 1 Maret 2025 dengan sasaran kegiatan Dinas Pendidikan, SPPG, dan Satuan Pendidikan Pelaksana MBG. Output dari kegiatan ini adalah Pendampingan Program MBG, Verifikasi Data Penerima Manfaat, dan Pemantauan Pelaksanaan Program di Daerah. Dampak dari kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan Prestasi Akademik Siswa dan dampak Kualitas Pendidikan dan Kesehatan siswa.
 3. Koordinasi SPPG dan Sistem Pemantauan Program MBG pada Dinas Pendidikan Kota Batam, di Kota Batam pada tanggal 24, 25 s.d. 27 Maret 2025 dengan sasaran kegiatan Dinas Pendidikan, SPPG, dan Satuan Pendidikan Pelaksana MBG. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi pelaksanaan MBG dengan memahami peran dan fungsi masing-masing. Dampak dari kegiatan ini diharapkan terwujudnya implementasi pendidikan bermutu untuk semua melalui penyediaan MBG bagi peserta didik untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
5. Subkomponen (ZJ) Pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan dengan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

100% pelaksanaan 2 kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Rapat Koordinasi Untuk Menyelesaikan Permasalahan Penanganan Peserta Didik SMK Negeri 2 Kota Batam, di Graha Kepulauan Riau Lt. 5 Kota Batam pada tanggal 7 Februari 2025 dengan sasaran kegiatan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Anggota DPRD, UPTD PPA Kota Batam, Ombudsman, Pihak sekolah, Pihak orangtua, dan BPMP Prov Kepulauan Riau. Output dari kegiatan ini adalah Koordinasi penyelesaian masalah isu pengeluaran siswa. Dampak dari kegiatan ini diharapkan adanya kesepakatan bahwa siswa yang bersangkutan tetap bersekolah dan mendapat pendampingan dari UPTD PPA Batam.
 2. Pra Rapat Koordinasi Untuk Menyelesaikan Permasalahan Penanganan Peserta Didik SMK Negeri 2 Kota Batam, di Graha Kepulauan Riau Lt. 5 Kota Batam pada tanggal 6 Februari 2025 dengan sasaran kegiatan Dinas Pendidikan Kota Batam, Pemerhati Anak Kepulauan Riau, dan SMKN2 Kota Batam. Output dari kegiatan ini adalah diadakannya Rapat Koordinasi terkait Kasus ini oleh Disdik Batam, SMK 2 dan BPMP Kepulauan Riau pada tanggal 7 Februari 2025. Dampak dari kegiatan ini diharapkan adanya Penyelesaian Permasalahan Siswa pada Kasus yang terjadi.
6. Subkomponen (ZL) Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dengan 100% pelaksanaan 4 kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan:
1. Sosialisasi Pelaksanaan SPMB Tahun 2025 dan Melakukan Survey Penyelenggaraan Diklat Pembelajaran Digital, Kota Batam pada tanggal 17 s.d. 18 Februari 2025 dengan sasaran kegiatan Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan se Provinsi Kepulauan Riau, BPMP, Ombudsman, Dinas Pendidikan Provinsi, dan tim Saber Pungli. Output dari kegiatan ini adalah Pakta Integritas SPMB di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Dampak dari kegiatan ini diharapkan pelaksanaan SPMB di wilayah dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dapat berjalan sesuai peraturan yang ada.
 2. Koordinasi Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Batam pada tanggal 12 s.d. 13 Maret 2025 dengan sasaran kegiatan Dinas pendidikan, Kepala Sekolah, MKKS. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi sekaligus sosialisasi dan pendampingan kebijakan SPMB. Dampak dari kegiatan ini diharapkan terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua melalui input satuan pendidikan yang berkeadilan, transparan, dan objektif.
 3. Persiapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Batam Tahun 2025, di Ruang Rapat Raja Ali Haji, Dinas Pendidikan Kota Batam pada tanggal 13 s.d. 14 Maret 2025 dengan sasaran kegiatan Dinas Pendidikan, Dinsos, Disdukcapil, Diskominfo. Output dari kegiatan ini adalah hasil perhitungan daya tampung jenjang PAUD, SD dan SMP Kota Batam. Dampak dari kegiatan ini diharapkan pelaksanaan SPMB di Kota Batam dapat terlaksana sesuai dengan Permendikdasmen No 3 tahun 2025.
 4. Sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK/SLB Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, di Hotel Golden View Kota Batam pada tanggal 17 s.d. 18 Maret 2025 dengan sasaran kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB se provinsi Kepulauan Riau. Output dari kegiatan ini adalah tersampaikan permendikdasmen no 3 tahun 2025 tentang SPMB kepada stakeholder. Dampak dari kegiatan ini diharapkan adanya SPMB pendidikan menengah/provinsi dapat berjalan dengan baik.
7. Subkomponen (ZO) Pendampingan Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan dengan 100% pelaksanaan 4 kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan:
1. Konsultasi dan Koordinasi Program Kemendikdasmen Tahun 2025, di Gd. E Lt. 5 Kemendikdasmen, Jakarta pada tanggal 10 s.d. 12 Januari 2025 dengan sasaran kegiatan Sesditjen PAUD Dasmen dan Subtim Perencanaan Setditjen. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya konsultasi dan koordinasi pelaksanaan anggaran melalui kegiatan-kegiatan prioritas Kemendikdasmen. Dampak dari kegiatan ini diharapkan terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua melalui implementasi kerangka kegiatan Protas BPMP.
 2. Rapat Kerja Bertemakan “Transformasi Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045: Peran Strategi BBPMP/BPMP dalam Mewujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua” di BPMP DI Yogyakarta pada tanggal 22 s.d. 25 Januari 2025 dengan sasaran kegiatan Kepala



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

BPMP seluruh Indonesia. Output dari kegiatan ini adalah draft Usulan Struktur Alur Kerja BB/BPMP hasil diskusi kepada Dirjen PAUD Dikdasmen serta draft Rencana pelaksanaan Porseni tahun 2025. Dampak dari kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan penjaminan mutu pendidikan melalui pendampingan ke pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

3. Acara Perkenalan Beasiswa ASEAN ke Singapura Untuk Satuan Pendidikan SMP di Level 3 Panbil Residence Kota Batam pada tanggal 12 s.d. 13 Februari 2025 dengan sasaran kegiatan dinas pendidikan kota batam, BPMP Provinsi Kepulauan Riau, dan kepala sekolah negeri/swasta di batam. Output dari kegiatan ini adalah Pertemuan strategis antara 30 kepala sekolah SMP di Batam dengan pihak Konsulat Jenderal Republik Singapura, Paparan praktik baik Kurikulum Merdeka dan transformasi digital oleh BPMP Kepulauan Riau, Sosialisasi langsung program ASEAN Scholarship for Indonesia kepada kepala sekolah dan siswa di Batam, dan Kunjungan ke beberapa SMP untuk memperluas informasi mengenai beasiswa. Dampak dari kegiatan ini diharapkan bahwa Kepala sekolah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang standar mutu pendidikan Singapura dan aplikasinya dalam konteks local, terbentuknya kesadaran dan motivasi dari para siswa dan guru untuk memanfaatkan peluang beasiswa internasional, meningkatnya partisipasi siswa Batam dalam proses seleksi Beasiswa ASEAN, serta terbukanya jalur komunikasi dan kolaborasi pendidikan antara Batam dan Singapura untuk jangka panjang.
4. Kegiatan Peluncuran "Goes to School" di Kota Batam pada tanggal 15 s.d. 16 Februari 2025 dengan sasaran kegiatan Kepala Sekolah dan Siswa Duta Pelajar Anti Narkoba. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemberian Anugerah Duta Pelajar Anti Narkoba dan launching buku berjudul 'Catatan Pelajar di Kepulauan Riau tentang Bahaya Narkoba'. Dampak dari kegiatan ini diharapkan terbentuknya karakter peserta didik yang sadar akan bahaya penyalahgunaan narkoba.

Kendala/Permasalahan

1. Kendala dari kegiatan Agenda Pertemuan dengan Walikota Batam, sekaligus mengikuti rangkaian kegiatan Kepemimpinan OSIS Berbagi SMP Negeri 12 Batam, di SMP Negeri 12 Batam adalah Pelantikan Walikota baru belum terlaksana dan menunggu kebijakan dari Pusat.
2. Kendala dari kegiatan Bootcamp Refleksi Pelaksanaan Tugas Konsultan BPMP Provinsi Kepulauan Riau, di Kab. Bintan adalah Terbatasnya pemahaman dan koordinasi di tingkat daerah.
3. Kendala dari kegiatan Diskusi Terpumpun terkait Kebijakan Digitalisasi Pendidikan dan Kecerdasan Artifisial bersama SKM, di Kota Batam adalah diklat terkait kecerdasan artifisial belum dilaksanakan.
4. Kendala dari kegiatan Koordinasi SPPG dan Sistem Pemantauan Program MBG pada Dinas Pendidikan Kota Batam, di Kota Batam adalah Belum ada petunjuk teknis pengelolaan bersama MBG antara SPPG, Disdik, dan BPMP.
5. Kendala dari kegiatan Pra Rapat Koordinasi Untuk Menyelesaikan Permasalahan Penanganan Peserta Didik SMK Negeri 2 Kota Batam, di Graha Kepri Lt. 5 Kota Batam adalah masih perlu koordinasi lebih lanjut.
6. Kendala dari kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Batam adalah Dinas Pendidikan belum melaksanakan sosialisasi kebijakan SPMB secara masif.
7. Kendala dari kegiatan Persiapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Batam Tahun 2025, di Ruang Rapat Raja Ali Haji, Dinas Pendidikan Kota Batam adalah Penggunaan daya tampung rombongan normal masih ada potensi siswa tidak tertampung di sekolah.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Tindak lanjut dari kegiatan Agenda Pertemuan dengan Walikota Batam, sekaligus mengikuti rangkaian kegiatan Kepemimpinan OSIS Berbagi SMP Negeri 12 Batam, di SMP Negeri 12 Batam adalah Melakukan koordinasi dan menjaga komunikasi secara berkesinambungan sembari menunggu legalitas kepemimpinan kota Batam.
2. Tindak lanjut dari kegiatan Bootcamp Refleksi Pelaksanaan Tugas Konsultan BPMP Provinsi Kepulauan Riau, di Kab. Bintan adalah Penguatan fasilitasi refleksi rutin dan peningkatan komunikasi lintas



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

stakeholder.

3. Tindak lanjut dari kegiatan Diskusi Terpumpun terkait Kebijakan Digitalisasi Pendidikan dan Kecerdasan Artifisial bersama SKM, di Kota Batam adalah kementerian melaksanakan diklat kecerdasan artifisial.
4. Tindak lanjut dari kegiatan Koordinasi SPPG dan Sistem Pemantauan Program MBG pada Dinas Pendidikan Kota Batam, di Kota Batam adalah Memastikan terlaksananya monitoring satuan pendidikan pelaksana MBG.
5. Tindak lanjut dari kegiatan Rapat Koordinasi Untuk Menyelesaikan Permasalahan Penanganan Peserta Didik SMK Negeri 2 Kota Batam, di Graha Kepri Lt. 5 Kota Batam adalah Prosesur PPKSP terus disosialisasikan kepada satuan pendidikan.
6. Tindak lanjut dari kegiatan Pra Rapat Koordinasi Untuk Menyelesaikan Permasalahan Penanganan Peserta Didik SMK Negeri 2 Kota Batam, di Graha Kepri Lt. 5 Kota Batam adalah Masih perlu koordinasi.
7. Tindak lanjut dari kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan SPMB Tahun 2025 dan Melakukan Survey Penyelenggaraan Diklat Pembelajaran Digital, Kota Batam adalah Tetap bersama sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan stakeholder terkait untuk mengawal pelaksanaan SPMB yang objective, Transparan dan akuntabel.
8. Tindak lanjut dari kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Batam adalah BPMP melakukan pendampingan kepada Dinas Pendidikan untuk sosialisasi SPMB .
9. Tindak lanjut dari kegiatan Persiapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Batam Tahun 2025, di Ruang Rapat Raja Ali Haji, Dinas Pendidikan Kota Batam adalah Menggunakan rombongan pengucualian.

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen

[IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan

Progress/Kegiatan

Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen didukung oleh KRO Fasilitas dan Pembinaan Lembaga (DI.7605.QDB) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 79.433.512 (0,94%) dari pagu anggaran Rp 8.406.687.000 (termasuk pagu blokir Rp 7.885.981.000). Capaian Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM Pendidikan dengan target 57,61% masih belum dapat dihitung realisasinya, dikarenakan belum ada data yang akan dijadikan dasar perhitungan. Akan tetapi sudah dilakukan beberapa kegiatan pendukung dari RO Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya (DI.7605.QDB.750) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 79.433.512 (0,94%) dari pagu anggaran Rp 8.406.687.000 (termasuk pagu blokir Rp 7.885.981.000).

Dengan rincian kegiatan dari komponen:

Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan (DI.7605.QDB.750.096) melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Subkomponen (ZB) Perencanaan Berbasis Data (PBD) dengan 100% pelaksanaan 2 kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026, di Aula Engku Hamidah Lt. IV Kantor Walikota Batam. pada tanggal 21 s.d. 22 Januari 2024 dengan sasaran kegiatan unsur Bappeda dan Dinas Pendidikan. Output dari kegiatan ini adalah berita acara forum konsultasi publik RKPD Kota Batam. Dampak dari kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan indeks SPM kota batam, khususnya SPM Pendidikan.
2. Subkomponen (ZO) Pendampingan Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan dengan 100% pelaksanaan 4 kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 1. Konsultasi dan Koordinasi Program Kemendikdasmen Tahun 2025, di Gd. E Lt. 5 Kemendikdasmen, Jakarta pada tanggal 10 s.d. 12 Januari 2025 dengan sasaran kegiatan Seditjen PAUD Dasmen dan Subtim Perencanaan Seditjen. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya konsultasi dan koordinasi pelaksanaan anggaran melalui kegiatan-kegiatan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

- prioritas Kemendikdasmen. Dampak dari kegiatan ini diharapkan terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua melalui implementasi kerangka kegiatan Protas BPMP.
2. Rapat Kerja Bertemakan “Transformasi Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045: Peran Strategi BBPMP/BPMP dalam Mewujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua” di BPMP DI Yogyakarta pada tanggal 22 s.d. 25 Januari 2025 dengan sasaran kegiatan Kepala BPMP seluruh Indonesia. Output dari kegiatan ini adalah draft Usulan Struktur Alur Kerja BB/BPMP hasil diskusi kepada Dirjen PAUD Dikdasmen serta draft Rencana pelaksanaan Porseni tahun 2025. Dampak dari kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan penjaminan mutu pendidikan melalui pendampingan ke pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
 3. Acara Perkenalan Beasiswa ASEAN ke Singapura Untuk Satuan Pendidikan SMP di Level 3 Panbil Residence Kota Batam pada tanggal 12 s.d. 13 Februari 2025 dengan sasaran kegiatan dinas pendidikan kota batam, BPMP Provinsi Kepulauan Riau, dan kepala sekolah negeri/swasta di batam. Output dari kegiatan ini adalah Pertemuan strategis antara 30 kepala sekolah SMP di Batam dengan pihak Konsulat Jenderal Republik Singapura, Paparan praktik baik Kurikulum Merdeka dan transformasi digital oleh BPMP Kepulauan Riau, Sosialisasi langsung program ASEAN Scholarship for Indonesia kepada kepala sekolah dan siswa di Batam, dan Kunjungan ke beberapa SMP untuk memperluas informasi mengenai beasiswa. Dampak dari kegiatan ini diharapkan bahwa Kepala sekolah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang standar mutu pendidikan Singapura dan aplikasinya dalam konteks local, terbentuknya kesadaran dan motivasi dari para siswa dan guru untuk memanfaatkan peluang beasiswa internasional, meningkatnya partisipasi siswa Batam dalam proses seleksi Beasiswa ASEAN, serta terbukanya jalur komunikasi dan kolaborasi pendidikan antara Batam dan Singapura untuk jangka panjang.
 4. Kegiatan Peluncuran "Goes to School" di Kota Batam pada tanggal 15 s.d. 16 Februari 2025 dengan sasaran kegiatan Kepala Sekolah dan Siswa Duta Pelajar Anti Narkoba. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemberian Anugerah Duta Pelajar Anti Narkoba dan launching buku berjudul ‘Catatan Pelajar di Kepulauan Riau tentang Bahaya Narkoba’. Dampak dari kegiatan ini diharapkan terbentuknya karakter peserta didik yang sadar akan bahaya penyalahgunaan narkoba.
3. Subkomponen (ZQ) Pendampingan Pemda dalam Perencanaan Perbaikan dan Peningkatan Mutu Berkelanjutan dengan 100% pelaksanaan 2 kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 1. Forum Konsultasi Publik terkait Penyusunan Ranwal RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029 di Hotel One of a Kind, Gunung Kijang, Kab. Bintan pada tanggal 26 Februari 2025 dengan sasaran kegiatan Bappeda, Dinas Pendidikan, STAIN SAR, Lembaga Adat. Output dari kegiatan ini adalah Berita acara forum konsultasi publik RPJMD Kabupaten Bintan. Dampak dari kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan mutu pendidikan Kabupaten Bintan.
 2. Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, di Ruang Rapat Dinas Pendidikan Kab. Bintan pada tanggal 19 Maret 2025 dengan sasaran kegiatan Dinas Pendidikan dan Bappeda. Output dari kegiatan ini adalah Berita acara forum perangkat daerah dalam penyusunan renstra. Dampak dari kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan mutu pendidikan Kabupaten Bintan.
 4. Subkomponen (ZR) Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan dengan 100% pelaksanaan yang dilaksanakan melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik: Digitalisasi layanan Sebagai Strategi Peningkatan Layanan Publik pada tanggal 14 Maret 2025 dengan sasaran kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota (Provinsi, Kabupaten Bintan, dan Kota Tanjungpinang), Satuan Pendidikan, Praktisi Pendidikan, Media Massa, Organisasi Masyarakat, Pengguna Layanan, UPT Kemendikdasmen, dan BPMP Provinsi Kepulauan Riau. Output dari kegiatan ini adalah Laporan Forum Konsultasi Publik, Berita Acara Uji Petik Standar Pelayanan, dan Berita Acara Hasil Penyelenggaraan FKP. Dampak dari kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan layanan publik yang lebih baik, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kendala/Permasalahan

1. Kendala dari kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Program Kemendikdasmen Tahun 2025, di Gd. E Lt. 5 Kemendikdasmen, Jakarta adalah Program prioritas belum sepenuhnya disosialisasikan secara resmi oleh Ditjen PAUD Dasmen.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

2. Kendala dari kegiatan Rapat Kerja Bertemakan "Transformasi Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045: Peran Strategi BBPMP/BPMP dalam Mewujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua di BPMP DI Yogyakarta adalah Struktur anggaran masih dalam bentuk program bukan perjenjang sesuai usulan struktur/alur kerja.
3. Kendala dari kegiatan Acara Perkenalan Beasiswa ASEAN ke Singapura Untuk Satuan Pendidikan SMP di Level 3 Panbil Residence Kota Batam antara lain terkait Kemampuan Bahasa Inggris: Tidak semua siswa memiliki kemampuan bahasa Inggris yang memadai untuk memenuhi syarat beasiswa, Akses Informasi: Informasi beasiswa bisa tidak merata diterima oleh seluruh sekolah dan siswa, Persiapan Seleksi: Kurangnya kesiapan siswa menghadapi tes akademik dan wawancara beasiswa karena waktu yang terbatas, Keterbatasan Sosialisasi: Sosialisasi mungkin tidak menjangkau semua SMP secara merata karena keterbatasan waktu dan sumber daya.
4. Kendala dari kegiatan Forum Konsultasi Publik: Digitalisasi layanan Sebagai Strategi Peningkatan Layanan Publik adalah Perubahan jadwal narasumber dari Ombudsman dari pagi menjadi siang hari secara daring.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Tindak lanjut dari kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Program Kemendikdasmen Tahun 2025, di Gd. E Lt. 5 Kemendikdasmen, Jakarta adalah Memastikan pemangku kepentingan untuk memahami dan melaksanakan sesuai kewenangan kebijakan Protas.
2. Tindak lanjut dari kegiatan Rapat Kerja Bertemakan "Transformasi Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045: Peran Strategi BBPMP/BPMP dalam Mewujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua di BPMP DI Yogyakarta adalah penyesuaian struktur anggaran dan perencanaan kegiatan sesuai struktur/alur kerja.
3. Tindak lanjut dari kegiatan Acara Perkenalan Beasiswa ASEAN ke Singapura Untuk Satuan Pendidikan SMP di Level 3 Panbil Residence Kota Batam antara lain terkait Pelatihan Bahasa Inggris dan Persiapan Tes: Dinas Pendidikan Kota Batam dapat menyelenggarakan program intensif bagi siswa yang berminat mengikuti seleksi beasiswa, Distribusi Informasi: Memastikan seluruh sekolah menerima informasi resmi dan lengkap tentang beasiswa, termasuk syarat dan jadwal seleksi, Pendampingan Pendaftaran: Menyediakan pendampingan teknis dan psikologis bagi siswa dan orang tua yang ingin mendaftar, Evaluasi dan Pemantauan: Mengadakan forum evaluasi berkala untuk mengukur dampak sosialisasi dan mengidentifikasi siswa berpotensi sejak dini, dan Kolaborasi Lintas Sektor: Memperkuat sinergi antara sekolah, dinas pendidikan, BPMP, dan pihak Singapura untuk merancang program penguatan kapasitas siswa ke depan.
4. Tindak lanjut dari kegiatan Forum Konsultasi Publik: Digitalisasi layanan Sebagai Strategi Peningkatan Layanan Publik adalah Menindaklanjuti hasil berita acara penyelenggaraan kegiatan Forum Konsultasi Publik dalam pertemuan rapat internal BPMP Provinsi Kepulauan Riau.

[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Kepulauan Riau

[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Kepulauan Riau dengan kategori sangat baik

Progress/Kegiatan

Dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal (WA.7606.EBA) dengan realisasi anggaran sebanyak Rp 2.501.876.164 (22,92%) dari pagu anggaran Rp 10.916.288.000 (termasuk pagu blokir Rp 2.166.535.000).

Capaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan definisi operasional tahun lalu diperoleh dari perhitungan nilai EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) / SMART dan nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) / OM-SPAM. Akan tetapi pada Bulan Maret 2025, BPMP Provinsi Kepulauan Riau belum memperoleh nilai EKA, sedangkan nilai IKPA



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

sebesar 97,15.

Dalam upaya untuk pencapaian kinerja pada IKK 2.1 pada triwulan I BPMP Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan beberapa kegiatan pendukung, yaitu RO Layanan Perkantoran (WA.2005.EBA.994) dengan realisasi sebesar Rp 2.501.876.164 (22,92%) dari pagu anggaran Rp 10.916.288.000 (termasuk pagu blokir Rp 2.166.535.000), yang terdiri dari:

1. Komponen Gaji dan Tunjangan (WA.2005.EBA.994.001) sebesar Rp 1.509.193.262 (34,13%) dari pagu anggaran Rp 4.421.469.000.
2. Komponen Operasional dan Pemeliharaan Kantor (WA.2005.EBA.994.002) sebesar Rp 992.682.902 (16,15) dari pagu anggaran Rp 5.152.136.098 (termasuk blokir Rp 1.816.535.000).

Selain itu, dalam upaya pencapaian target IKK 2.1, pada triwulan I BPMP Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penyesuaian anggaran dan rencana penarikan dana dengan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui revisi anggaran dengan konsultasi dan koordinasi dengan Eselon I dan Kanwil DJPb. Revisi yang sudah dilakukan pada triwulan I ini antara lain:
 1. Revisi ke-1 DIPA tingkat Kanwil dengan pengesahan tanggal 24 Januari 2025 terkait Revisi pergeseran belanja barang dan pemutakhiran akun,
 2. Revisi ke-2 DIPA tingkat DJA dengan pengesahan tanggal 22 Februari 2025 terkait Revisi penambahan pencantuman blokir anggaran semula Rp 6.824.505.000 menjadi Rp 10.052.516.000,
 3. Revisi ke-3 DIPA tingkat Kanwil dengan pengesahan tanggal 21 Maret 2025 terkait Revisi pergeseran belanja barang, pemutakhiran akun, dan perubahan rencana penarikan dana.
2. Menghimpun usulan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran,
3. Mengelola dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu,
4. Pengelolaan Kepegawaian dalam rangka pencairan Belanja Pegawai dengan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku.
5. Mengikuti Kegiatan Pengenalan Coretax Bagi Wajib Pajak Instansi Pemerintah Pada Satker Wilayah Kerja KPPN Tanjungpinang pada tanggal 23 Januari 2025 dengan sasaran kegiatan Bendahara Pengeluaran di lingkup kerja KPPN Tanjungpinang. Output dari kegiatan ini adalah akun coretax BPMP Provinsi Kepulauan Riau telah diaktivasi. Dampak dari kegiatan ini diharapkan adanya implementasi pembayaran dan pelaporan pajak menggunakan aplikasi coretax di tahun 2025.

Kendala/Permasalahan

Nilai EKA yang belum dapat dihitung.

Strategi/Tindak Lanjut

Berkoordinasi dengan eselon I

[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Kepulauan Riau

[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Kepulauan Riau minimal A

Progress/Kegiatan

Dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal (WA.7606.EBA) dengan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

realisasi anggaran sebanyak Rp 2.501.876.164 (22,92%) dari pagu anggaran Rp 10.916.288.000 (termasuk pagu blokir Rp 2.166.535.000).

Capaian kinerja Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dengan target kinerja A akan diperoleh hasil pada triwulan IV. Akan tetapi dalam upaya untuk pencapaian target kinerja pada IKK 2.2 pada triwulan I BPMP Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan beberapa kegiatan pendukung dari:

1. RO Penyusunan Laporan BMN (WA.7606.EBA.956) dengan realisasi dari komponen Penyusunan Dokumen Layanan BMN (WA.7606.EBA.956.059) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 0 (0%) dari pagu anggaran Rp 10.000.000 (termasuk pagu blokir Rp 10.000.000).
2. RO Layanan Umum (WA.7606.EBA.962) dengan realisasi dari komponen Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan (WA.7606.EBA.962.062) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 0 (0%) dari pagu anggaran Rp 340.000.000 (termasuk pagu blokir Rp 340.000.000).

Selain itu, dalam upaya pencapaian target IKK 2.2 sesuai PK 2024 yang nilainya akan diperoleh pada triwulan ke IV, pada triwulan I BPMP Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Mengupload Laporan Kinerja tahun 2024 di aplikasi Spasikita dan laman resmi BPMP Provinsi Kepulauan Riau;
2. Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP (LHE) SAKIP TA 2024;
3. Melakukan pemantauan nilai IKPA melalui omspan;
4. Menyusun Laporan Keuangan BPMP Provinsi Kepulauan Riau TA 2024;
5. Melakukan perbaikan menyeluruh di lembaga (baik infrastruktur maupun administratif) terkait persiapan penilaian ZI WBK;
6. Melakukan Revisi anggaran dengan tidak mengubah target kinerja;
7. Update Informasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan di laman resmi BPMP Provinsi Kepulauan Riau (<https://bpmpKepulauanRiau.kemdikbud.go.id/>) dan Medsos BPMP Provinsi Kepulauan Riau (Facebook : Lpmp Kepulauan Riau dan instagram : bpmp_kepulauan_riau)
8. Mengikuti kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2025 Ditjen PAUD Dasmen, di Ra Suites Simatupang, Jakarta pada tanggal 31 Januari s.d. 2 Februari 2025 dengan sasaran kegiatan Perwakilan Kepala BPMP seluruh Indonesia. Output dari kegiatan ini adalah design penjaminan mutu oleh BPMP dan Kebijakan program dan anggaran tahun 2025 terkait efisiensi. Dampak dari kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan pendampingan penjaminan mutu pendidikan ke pemerintah daerah dapat lebih efektif dan efisien.

Kendala/Permasalahan

Kendala dari kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2025 Ditjen PAUD Dasmen, di Ra Suites Simatupang, Jakarta adalah terdapat efisiensi anggaran tahun 2025.

Strategi/Tindak Lanjut

Tindak lanjut dari kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2025 Ditjen PAUD Dasmen, di Ra Suites Simatupang, Jakarta adalah menyesuaikan strategi penjaminan mutu serta metode pelaksanaan.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DI.7605.QDB.750] Satuan PAUD Dikdas Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	115	1041	Rp4.971.402.000	Rp2.024.771.857	40.73
2	[WA.7606.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	0	0	Rp10.000.000	Rp0	0.00
3	[WA.7606.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp340.000.000	Rp0	0.00
4	[WA.7606.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp10.566.288.000	Rp6.620.648.979	62.66
Total Anggaran					Rp15.887.690.000	Rp8.645.420.836	54.42

D. Rekomendasi Pimpinan

- Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran dengan target 64,06% dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain:
 - Sosialisasi Program Revitalisasi Sekolah dan kolaborasi dalam implementasinya;
 - Sosialisasi dan Koordinasi SPMB;
 - Advokasi dan Pendampingan Program Wajib Belajar 13 tahun dan Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kab/Kota Piloting;
 - Advokasi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat;
 - Pendampingan Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis;
 - Penyampaian Kebijakan dalam Pembelajaran dan Penilaian terbaru;
 - Perlu dilakukan pendampingan penatausahaan Dana Transfer Daerah.
- Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan 1.2 Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM Pendidikan dengan target 57,61% dapat dilakukan melalui Penyusunan Buku Profil Mutu Pendidikan masing-masing daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Kepulauan Riau dengan kategori sangat baik dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain dengan terus berkoordinasi dengan Kanwil DJPb Tanjungpinang dan KPPN Tanjungpinang, serta pengembangan kapasitas pegawai dalam pengelolaan anggaran.
- Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan 2.2 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Kepulauan Riau minimal A dapat dilakukan melalui dorongan peningkatan kapasitas SDM UPT dalam mendukung tata kelola yang bersih, dan inovatif.

Bintan, 28 Agustus 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Penjaminan Mutu
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Warsita



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**